

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis unit pemukiman transmigrasi (UPT). Bekkae berada diantara 03°C 49'00," – 03°C 51' 30" lintang selatan (SL) dan 120°C 12' 28" – 120°C 16' 00" bujur timur (BT), keadaan topografinya relatif datar dengan ketinggian 90 meter dari permukaan laut tipe topografi. UPT Bekkae adalah lokasi transmigrasi yang terletak di Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo dalam artian secara administratif, UPT Bekkae termasuk dalam Wilayah Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan secara fisik lokasi UPT Bekkae berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Buttu Labuasa
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Area perkebunan kelapa sawit PTPN XIV
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Gilireng
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Administrasi Desa Arajang

2. Karakteristik Responden

a. Umur

Tabel 5.1
Distribusi Responden Berdasarkan Umur
Di UPT Bekkae Desa Paselloreng
Kecamatan Gilireng
Kabupaten Wajo

Umur	n	%
30-40 Tahun	20	22,2
41-50 Tahun	31	34,4
51-60 Tahun	27	30,0
61-70 Tahun	9	10,0
71-80 Tahun	3	3,3
Total	90	100

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa kelompok umur yang paling banyak yaitu pada rentang umur 41-50 tahun sebanyak 31 orang (34,4%), dan jumlah kelompok umur yang paling sedikit yaitu pada rentang umur 71-80 tahun dengan 3 orang (3,3%)

b. Jenis Kelamin

Tabel 5.2
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Di UPT Bekkae Desa Paselloreng
Kecamatan Gilireng
Kabupaten Wajo

Jenis Kelamin	n	%
Laki-Laki	79	87,8
Perempuan	11	12,2
Total	90	100

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa jenis kelamin yang paling banyak yaitu laki-laki sebanyak 79 orang (87,8%) dan perempuan sebanyak 11 orang (12,2%)

c. Pendidikan

Tabel 5.3
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan
Di UPT Bekkae Desa Paselloreng
Kecamatan Gilireng
Kabupaten Wajo

Pendidikan	n	%
Tidak Pernah Sekolah	1	1,1
Tidak Tamat SD	3	3,3
SD	67	74,4
SMP/Sederajat	11	12,2
SMA/Sederajat	8	8,9
Total	90	100

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang paling banyak yaitu SD sebanyak 67 orang (74,4%), sedangkan yang paling sedikit yaitu tidak pernah sekolah sebanyak 1 orang (1,1%).

d. Pekerjaan

Tabel 5.4
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan
Di UPT Bekkae Desa Paselloreng
Kecamatan Gilireng
Kabupaten Wajo

Pekerjaan	n	%
Wirasawasta	18	20,0
Ibu Tumah Tangga	11	12,2
Petani	59	65,6
Buruh	2	2,2
Total	90	100

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa pekerjaan yang paling banyak yaitu petani sebanyak 59 orang (65,6%), dan paling sedikit yaitu buruh sebanyak 2 orang (2,2%).

e. Pendapatan

Tabel 5.5
Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan
Di UPT Bekkaee Desa Paselloreng
Kecamatan Gilireng
Kabupaten Wajo

Pendapatan	n	%
< Rp.3.434.298	90	100
> Rp.3.434.298	0	0
Total	90	100

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa seluruh responden di UPT Bekkaee Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo memiliki pendapatan yang rendah atau < Rp. 3.434.298 sebanyak 90 orang (100%).

3. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk melihat gambaran distribusi frekuensi variabel independent dan variabel dependen. Variabel Independen adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dan variabel dependen adalah implementasi. Gambaran distribusi frekuensi dari masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut :

a. Komunikasi

Tabel 5.6
Distribusi Frekuensi Komunikasi di UPT Bekkae
Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng
Kabupaten Wajo

Komunikasi	n	%
Baik	81	90
Kurang Baik	9	10
Total	90	100

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari 90 responden sebagian besar responden yaitu 81 orang (90%) yang menyatakan komunikasi baik sedangkan 9 orang (10%) yang menyatakan komunikasi kurang baik.

b. Sumber Daya

Tabel 5.7
Distribusi Frekuensi Sumber Daya di UPT Bekkae
Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng
Kabupaten Wajo

Sumber Daya	n	%
Baik	85	94,4
Kurang Baik	5	5,6
Total	90	100

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan bahwa dari 90 responden sebagian besar responden yaitu 85 orang

(94,4%) yang menyatakan sumber daya baik sedangkan 5 orang (5,6%) yang menyatakan sumber daya kurang baik.

c. Disposisi

Tabel 5.8
Distribusi Frekuensi Disposisi di UPT Bekkae
Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng
Kabupaten Wajo

Disposisi	n	%
Baik	82	91,1
Kurang Baik	8	8,9
Total	90	100

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 5.7 menunjukkan bahwa dari 90 responden sebagian besar responden yaitu 82 orang (91,1%) yang menyatakan disposisi baik sedangkan 8 orang (8,9%) yang menyatakan disposisi kurang baik.

d. Struktur Birokrasi

Tabel 5.9
Distribusi Frekuensi Struktur Birokrasi
di UPT Bekkae Desa Paselloreng
Kecamatan Gilireng
Kabupaten Wajo

Struktur Birokrasi	n	%
Baik	86	95,6
Kurang Baik	4	4,4
Total	90	100

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 5.8 menunjukkan bahwa dari 90 responden sebagian besar responden yaitu 86 orang (95,6%) yang menyatakan struktur birokrasi baik sedangkan 4 orang (4,4%) yang menyatakan struktur birokrasi kurang baik.

e. Implementasi

Tabel 5.10
Distribusi Frekuensi Implementasi di UPT Bekkae
Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng
Kabupaten Wajo

Implementasi	n	%
Optimal	80	88,9
Kurang Optimal	10	11,1
Total	90	100

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 5.9 menunjukkan bahwa dari 90 responden sebagian besar responden yaitu 80 orang (88,9%) yang menyatakan implementasi optimal sedangkan 10 orang (11,1%) yang menyatakan implementasi kurang optimal

4. Analisis Bivariat

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap implementasi program jaminan kesehatan nasional.

a. Pengaruh Komunikasi dengan Implementasi

Tabel 5.11
Pengaruh Komunikasi dengan Implementasi
Di UPT Bekkae Desa Paselloreng
Kecamatan Gilireng
Kabupaten Wajo

Komunikasi	Implementasi				Total		P Value	Uji Parsial
	Optimal		Kurang Optimal					
	n	%	n	%	n	%		
Baik	75	92,6	6	7,4	81	100	0,001	0,022
Kurang Baik	5	55,6	4	44,4	9	100		
Total	80	88,9	10	11,1	90	100		

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 5.10 menunjukkan bahwa dari 81 responden yang menyatakan variabel komunikasi baik terdapat 75 orang (92,6%) yang menyatakan implementasi optimal dan terdapat 6 orang (7,4%) menyatakan implelementasi kurang optimal. Sedangkan dari 9 responden yang menyatakan variabel komunikasi kurang baik terdapat 5 orang (55,6%) yang menyatakan implementasi optimal dan terdapat 4 orang (44,4%) yang menyatakan implementasi kurang optimal.

Berdasarkan hasil uji statistik *chi-square* diperoleh nilai p-value = 0,001 sedangkan hasil uji parsial (Uji T) diperoleh nilai 0,022 ($p < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh komunikasi terhadap implementasi.

b. Pengaruh Sumber Daya dengan Implementasi

Tabel 5.12
Pengaruh Sumber Daya dengan Implementasi
Di UPT Bekkae Desa Paselloreng
Kecamatan Gilireng
Kabupaten Wajo

Sumber Daya	Implementasi				Total		P Value	Uji Parsial
	Optimal		Kurang Optimal					
	n	%	n	%	n	%		
Baik	77	90,6	8	9,4	85	100	0,034	0,037
Kurang Baik	3	60	2	40	5	100		
Total	80	88,9	10	11,1	90	100		

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 5.11 menunjukkan bahwa dari 85 responden yang menyatakan variabel sumber daya baik terdapat 77 orang (90,6%) yang menyatakan implementasi optimal dan terdapat 8 orang (9,4%) menyatakan impelementasi kurang optimal. Sedangkan dari 5 responden yang menyatakan variabel sumber daya kurang baik terdapat 3 orang (60%) yang menyatakan implementasi optimal dan terdapat 2 orang (40%) yang menyatakan implementasi kurang optimal.

Berdasarkan hasil uji statistik *chi-square* diperoleh nilai p-value = 0,034 sedangkan hasil Uji Parsial (Uji T) diperoleh nilai 0,037 ($p < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan sumber daya terhadap implementasi.

c. Pengaruh Disposisi dengan Implementasi

Tabel 5.13
Pengaruh Disposisi dengan Implementasi
Di UPT Bekkae Desa Paselloreng
Kecamatan Gilireng
Kabupaten Wajo

Disposisi	Implementasi				Total		P Value	Uji Parsial
	Optimal		Kurang Optimal					
	n	%	n	%	n	%		
Baik	75	91,5	7	8,5	82	100	0,013	0,070
Kurang Baik	5	62,5	3	37,5	8	100		
Total	80	88,9	10	11,1	90	100		

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 5.12 menunjukkan bahwa dari 82 responden yang menyatakan variabel disposisi baik terdapat 75 orang (91,5%) yang menyatakan implementasi optimal dan terdapat 7 orang (8,5%) menyatakan implementasi kurang optimal. Sedangkan dari 8 responden yang menyatakan variabel sumber daya kurang baik terdapat 5 orang (62,5%) yang menyatakan implementasi optimal dan terdapat 3 orang (37,5%) yang menyatakan implementasi kurang optimal.

Berdasarkan hasil uji statistik *chi-square* diperoleh nilai p-value = 0,013 sedangkan hasil Uji Parsial (Uji T) diperoleh nilai 0,070 ($p > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh disposisi terhadap implementasi.

d. Pengaruh Struktur Birokrasi dengan Implementasi

Tabel 5.14
Pengaruh Struktur Birokrasi dengan Implementasi
Di UPT Bekkae Desa Paselloreng
Kecamatan Gilireng
Kabupaten Wajo

Struktur Birokrasi	Implementasi				Total		P Value	Uji Parsial
	Optimal		Kurang Optimal					
	n	%	n	%	n	%		
Baik	79	91,9	7	8,1	86	100	0,000	0,002
Kurang Baik	1	25	3	75	4	100		
Total	80	88,9	10	11,1	90	100		

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 5.13 menunjukkan bahwa dari 86 responden yang menyatakan variabel struktur birokrasi baik terdapat 79 orang (91,9%) yang menyatakan implementasi optimal dan terdapat 7 orang (8,1%) menyatakan impelementasi kurang optimal. Sedangkan dari 4 responden yang menyatakan variabel struktur birokrasi kurang baik terdapat 1 orang (25%) yang menyatakan implementasi optimal dan terdapat 3 orang (75%) yang menyatakan implementasi kurang optimal.

Berdasarkan hasil uji statistik *chi-square* diperoleh nilai p-value = 0,000 sedangkan hasil uji parsial (Uji T) diperoleh nilai 0,002 ($p < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh struktur birokrasi terhadap implementasi.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah disajikan, maka pembahasan ini akan menjelaskan masing-masing variabel sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi program jaminan kesehatan nasional di UPT Bekkae Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.

1. Pengaruh Variabel Komunikasi dengan Implementasi

Komunikasi mengacu pada proses sosialisasi dan informasi tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan (FASKES) kepada masyarakat. Aspek ini meliputi kualitas dan kejelasan informasi yang disampaikan, frekuensi perubahan peraturan, serta konsistensi informasi antara BPJS dan FASKES. Komunikasi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Program JKN, membantu masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap, serta meminimalisir adanya perbedaan informasi yang bisa menimbulkan kebingungan.

Komunikasi menjadi bagian terpenting dalam proses terciptanya implementasi program jaminan kesehatan nasional, sebab komunikasi berfungsi sebagai media penyampaian pendapat kepada masyarakat akan pentingnya program jaminan

kesehatan nasional apabila diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentunya mampu menjadi jembatan bagi terciptanya ide atau gagasan sehingga memunculkan interaksi antar masyarakat demi terciptanya kesepakatan sehingga dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Siti Rahmatia di provinsi Gorontalo yang menyatakan bahwa Komunikasi (*communications*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal dengan nilai determinan sebesar 24,90% (Siti Rahmatia, 2023).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Joko Lelono dan Annisa Rahmadanita yang menyatakan bahwa pada 4 (empat) dimensi yang digunakan, diketahui bahwa komunikasi belum pernah dilakukan sosialisasi secara khusus dan terjadwal terkait alur prosedur pelayanan dan tata tertib pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Joko Lelono, 2023). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Resa Listiani yang menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian kebijakan kesehatan nasional sudah cukup baik tetapi masih adanya terdapat golongan masyarakat yang belum mendapatkan manfaat yang dihasilkan oleh Program JKN

yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya yang ada untuk melakukan komunikasi dan koordinasi antara pemangku kebijakan, tenaga kesehatan dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, yang membuat sulitnya mendapatkan informasi terkait Program JKN (Resal Listiani, 2022)

2. Pengaruh Variabel Sumber Daya dengan Implementasi

Sumber Daya mencakup ketersediaan dan kemampuan pegawai BPJS Kesehatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk waktu tunggu pelayanan, pengetahuan pegawai tentang tugas dan fungsi mereka, serta distribusi wewenang dan koordinasi antar lembaga. Sumber daya yang memadai dan terkelola dengan baik esensial untuk memastikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada peserta Program JKN.

Ketersediaan sumber daya menjadi poin penting demi tercapainya implementasi program jaminan Kesehatan nasional di UPT Bekkae Desa Paselloreng, sebab sumber daya yang baik dalam arti pegawai yang kompeten maupun ketersediaan perlengkapan yang dimiliki menjadi poin utama dalam meningkatkan branding kepada masyarakat sehingga nantinya apa yang disampaikan maupun apa yang dimiliki mampu memberikan poin tambah bahwa sumber daya yang dimiliki

bersifat profesionalitas sehingga tujuan dari pengimplementasian jaminan kesehatan nasional bisa tercapai sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Khairunnisa Alya Puspita di kota sukabumi yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang berdasar pada dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap partisipasi masyarakat, dengan koefisien determinasi (R^2) yaitu sebesar 14.8% (Khairunnisa Alya Puspita, 2023). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizal Wahyudin yang menyatakan bahwa dimensi sumber daya dengan tingkat signifikansi 0,000 dan standar koefisien 0,208; menggambarkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yaitu dokter dan perawat yang memadai dengan kualitas pelayanan secara keseluruhan (Rizal Wahyudin, 2016)

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mariam yang mengatakan bahwa proses implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi belum secara keseluruhan efektif, disebabkan karena ketersediaan beberapa jenis sumber daya yang sangat

dibutuhkan untuk mendukung proses implementasi program belum memadai, seperti minimnya sumber daya manusia yang masih belum ideal terhadap beban tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan, kapasitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang tersedia tidak sesuai (Mariam, 2016)

3. Pengaruh Disposisi dengan Implementasi

Disposisi berkaitan dengan sikap dan responsivitas pegawai BPJS Kesehatan dalam interaksi mereka dengan masyarakat, termasuk dalam hal pemberian sosialisasi, penanganan keluhan, dan tanggapan terhadap usulan atau masukan dari masyarakat. Sikap yang ramah dan responsif dari pegawai diharapkan dapat menciptakan pengalaman positif bagi peserta JKN, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap Program JKN.

Peran disposisi dalam penelitian ini menjadi poin penting sebab berhubungan dengan sikap dan responsivitas para pegawai sehingga menjadi ujung tombak dalam pelayanan ini, pegawai yang ditugaskan diharapkan memiliki sikap yang profesional dan tentunya responsive dengan apa yang menjadi keluhan masyarakat sehingga masyarakat bisa menilai bahwa pengimplementasian ini menjadi sangat penting guna terciptanya tujuan pengaplikasian agar seluruh masyarakat terlindungi sehingga tujuan dasar pemerintah dalam

memberikan layanan dasar bagi masyarakat dengan layak bisa terpenuhi dan terealisasikan dengan tepat.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anindya Nurramadhanti yang menyatakan bahwa ada hubungan antara komunikasi, sumber daya disposisi dan struktur birokrasi terhadap keberhasilan implementasi program JKN. (Anindya Nurramadhanti, 2015) . Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari bahwa variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan JKN tentang klaim *INA CBG's* di Rumah Sakit Islam Malahayati Medan. R square sebesar 0,261, artinya variabel tersebut dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel implementasi kebijakan JKN tentang klaim *INA CBG's* sebesar 26,1%, sedangkan sisanya 73,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti. Secara parsial hanya variabel sumber daya dan komunikasi yang berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan JKN tentang klaim *INA CBG's*, namun yang paling dominan memengaruhi implementasi kebijakan JKN tentang klaim *INA CBG's* di Rumah Sakit Islam Malahayati Medan adalah variabel sumber daya (Sari, 2018)

4. Pengaruh Struktur Birokrasi dengan Implementasi

Struktur Birokrasi mengacu pada pengelolaan internal BPJS Kesehatan, termasuk kepatuhan terhadap *SOP*, koordinasi antar pegawai, pengelolaan kepesertaan, dan pembagian tugas di kantor BPJS Kesehatan. Struktur birokrasi yang efisien dan efektif penting untuk mendukung kelancaran proses pelayanan kepada masyarakat, memastikan bahwa setiap aspek pelayanan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan memperkuat koordinasi di dalam organisasi.

Struktur birokrasi yang baik tentunya mampu menciptakan ekosistem lingkungan yang baik, sebab struktur birokrasi menjadi inti terbentuknya sistem yang dijalankan, tata cara yang dikelola, peraturan yang dibentuk serta ruang lingkup yang berhubungan dengan proses pengaplikasian program jaminan kesehatan nasional. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dalam sistem birokrasi sehingga nantinya proses yang dijalani sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga proses proses pengaplikasi jaminan kesehatan nasional berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Basuki Rahmat yang menyatakan bahwa struktur birokrasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan

masyarakat miskin (Basuki Rahmat, 2020) . Hasil Penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan Adrian Tawai yang mengatakan bahwa Struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan program jaminan kesehatan nasional (JKN) di Dinas Kesehatan Kota Kendari sudah tersedia dengan baik oleh Pemerintah Pusat. Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi akan memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan *Standart Operating Procedure (SOP)* (Adrian Tawai, 2023)